



Systematic review : implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap program jaminan kesehatan nasional di wilayah pesisir

Maysara Edriani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

maysaraedriani76@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 Juni 2022

Disetujui :

20 Juni 2022

Dipublikasikan :

25 Juni 2022

ABSTRAK

Implementasi kebijakan adalah salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk pengambilan keputusan dan implementasi ini merupakan tahapan yang komprehensif, dan kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditujukan untuk umum yang terkait dengan negara dan masyarakat dalam berbagai status dan untuk minat lain. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pada program jaminan kesehatan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan metode sistematis review dengan menggunakan sumber dari jurnal maupun buku. Setelah melakukan sistematis review dari 8 jurnal hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program jaminan kesehatan nasional di wilayah pesisir belum berjalan dengan baik. Pada sistematis review dari beberapa jurnal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa masih banyaknya ketidakadilan pembagian pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkhususnya di wilayah pesisir tersebut.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Jaminan kesehatan nasional

ABSTRACT

Policy implementation is one of the actions to achieve the goals that have been previously planned for decision making and this implementation is a comprehensive stage, and government policy is a policy aimed at the public which is related to the state and society in various statuses and for other interests. This study uses a systematic review method using sources from journals and books. After conducting a systematic review of 8 journals, the results of this study indicate that the national health insurance program in coastal areas has not been running well. In a systematic review of several journals, the researchers concluded that there are still many unequal distribution of health services to the community, especially in the coastal area.

Keywords: Policy implementation, National health insurance



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di era reformasi sekarang, kata perubahan adalah menjadi kata yang sering ditujukan masyarakat terhadap pemerintah tentang kebijakan jaminan kesehatan nasional yang pembagian pelayanan kesehatan tersebut tidak terbagi rata di wilayah pesisir tersebut. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional dapat dilihat pada pasal 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, seperti berikut : "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya", Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat. Pencapaian pelayanan kesehatan yang bermutu harus disertai dengan keinginan pemerintah daerah setempat untuk membangun tingkat pelayanan kesehatan masyarakat.

Dikutip dari permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Pesisir. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pada program jaminan kesehatan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sistematik review dengan menggunakan sumber dari jurnal maupun buku. Sitematik review ini juga dapat diartikan sebagai uraian tentang teori,temuan,dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin kami teliti untuk mengungkapkan secara mendalam tentang implementasi kebijakan pada program jaminan kesehatan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan sistematik review dari 8 jurnal hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program jaminan kesehatan nasional diwilayah pesisir belum berjalan dengan baik.

Tabel 1. Systematic Riview

No	Judul Penelitian	Tahun/Author	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang	Eko Wahyu Basuki,Dra.Suli styowaty,M.Si, Nunik Retno (2016)	Metode penelitian yang digunakan peniliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui data sekunder dan primer	Regulasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan,sangat menentukan sukses tidaknya sistem jaminan sosial esehatan tersebut. Selain itu masih banyak keluhan-keluhan yang bermunculan di masyarakat terkait dengan pelayanan keehatan. ⁽¹⁾
2.	Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Donggala	Rizal Wahyudin,Naw ari Natsir,dan Ani Susanti (2019)	Penelitian ini menggunakan metode survei.Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder dan data primer	Berdasarkan hasil analisis regresi linear secara simultan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. ⁽²⁾

No	Judul Penelitian	Tahun/Author	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN UNDANG-gram Jaminan Kesehatan Daerah Sumatera Barat pembiayaan kesehatan sehingga pelayanan kes-Jamkesda Sumatera Barat Sakato melibatkan pihak ketiga sebagai Badan Penyelenggaran (Bapel) yaitu Sistem J	Jamkesda, Scheme Sumatera, West (2013)	Penelitian ini merupakan penelitian analisis diskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data digunakan dengan melalui wawancara	Pelaksanaan jaminan kesehatan Sumatera Barat Sakato berdasarakan hasil kajian masih diraskan belum optimal yaitu masih banyak cara pemilihan peserta yang tidak secara merata. ⁽³⁾
4	Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara	Richard Djiko (2016)	Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif deskripti.Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data Primer dan Sekunder	Hasil Peneilitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional belum berjalan secara maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta
5	Analisis Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan Anggota Kepersetaan BPJS	Satriya Wijaya (2017)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta penelaahan dokumen.Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan retrospektif	Hasil analisis menunjukan tidak semua masyarakat telah menjadi peserta BPJS. ⁽⁵⁾

No	Judul Penelitian	Tahun/Author	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi	Kamal Alamsyah, Elya Niken Prastiwi, Ummu Salamah (2021)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitiannya adalah kualitatif	Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor dalam mengimplementasikan kebijakan jaminan kesehatan.
7	Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin NonKouta (Jamkesda dan SPM)	Nuryatin Phaksy Sukowati, Minto Hadi, Stefanus Pani Rengu (2021)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini masih adanya disposisi dalam pelayanan kesehatan.
8	Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Undat Palu	Agussalim, Her miyanti, Abd. Rahman (2017)	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan JKN RSUD Undat Palu belum maksimal pelaksanaannya seperti komunikasi antara petugas dan pasien yang belum sepenuhnya baik.

Pembahasan Penelitian

Kebijakan Jaminan Kesehatan salah satu bagian yang terpenting untuk menciptakan masyarakat yang terlepas dari belenggunya ketidakberdayaan, dimana akses kesehatan yang sangat sulit terkadang membuat masyarakat rela dalam kesakitan, kesehatan telah menjadikan masalah tersendiri dalam masyarakat yang telah lama berusaha untuk dihilangkan. Kebijakan jaminan kesehatan merupakan “Kebijakan yang terwujud dari implementasi kebijakan publik yang telah melibatkan berbagai macam potensi-potensi dengan model-model tertentu, tentu kebijakan ini bagian dari kebijakan yang telah teproses dengan matang dan tepat untuk diterapkan didaerah yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif” Implementasi sebuah kebijakan akan didukung oleh berbagai faktor, begitupun dengan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir. Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak melihat bagaimana pengaruh faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan implmentasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir. Adapun hasil penelitian literature yang telah diperoleh peneliti dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

a. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang memadai

Meningkatnya angka partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat merupakan faktor yang mendukung jalannya pengimplementasian kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir. Pada tahun 2014 angka kunjungan peserta Jamkesda ke Puskesmas mencapai angka 65 persen masyarakat, berbanding jauh dari peserta Askes dan Jamkesmas yang masing masing hanya 7 persen pasien dan 5 persen pasien. Ini dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat untuk memperoleh kesehatan yang menggunakan Jamkesda pada Pukesmas Di wilayah pesisir.

b. Kondisi Lingkungan Pelayanan Kesehatan

Faktor lingkungan merupakan faktor selanjutnya dalam menilai kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir. Seperti yang telah di ketahui, lingkungan merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun balai-balai pengobatan. Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung dalam terselenggaranya suatu layanan kesehatan yang nyaman. Lingkungan yang bersih nyaman merupakan bagian dari pengimplentasian kebijakan yang mengedepankan suatu pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian implemetor program. Dalam implementasi suatu kebijakan tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya kebijakan dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan apapun tidak dapat berjalan dan hanya tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu ketersediaan pelaksanaan yang cukup berkompetensi dalam mendorong keberhasilan kebijakan tersebut. Seperti diketahui terdapat beberapa kasus yang sebelumnya telah di paparkan oleh peneliti. Untuk melihat kembali kenyataan yang di paparkan, kondisi ketenagaan atau tenaga kesehatan yang ada seluruh fasilitas kesehatan di wilayah pesisir jauh dari apa yang diharapkan.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan

Selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Kondisi sarana dan prasarana pada salah satu-fasilitas kesehatan yang ada di wilayah pesisir yaitu Puskesmas disetiap wilayah pesisir. Dari data tersebut peneliti melihat kurangnya sarana dan prasarana kesehatan memungkinkan terjadinya suatu manajemen pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang baik. Aspek sumber daya ini merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh.

c. Akses dalam memperoleh Informasi pelayanan kesehatan

Pemerintahan Di wilayah pesisir sering memberikan sosialisasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang program jaminan kesehatan yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal inisesuai yang tercantum dalam pasal 11 point (2) yang menyebutkan bahwa :“Badan Penyelenggra Jaminan Kesehatan Daerah wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kelemahan pelayanan kesehatan masyarakat yang selama ini di berikan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2007 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah adalah berada pada sumber daya yang berupa tenaga kesehatan yang belum tercukupi, Sarana dan prasaranan pada fasilitas kesehatan yang belum memadai, lingkungan pelayanan kesehatan yang tidak terlalu mendukung, serta akses dalam mendapatkan informasi pelayanan kesehatan yang akan menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang terpadu bagi masyarakat Di wilayah pesisir.

Selain itu sikap yang ditunjukan pelayanan kesehatan harus baik sesuai dengan etika profesi yangtelah mereka dapatkan selama pendidikan. Oleh karena itu faktor disposisi tersebut dalapat lebih ditingkatkan pelayanannya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Pada sistematik review dari beberapa jurnal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa masih banyaknya pentidakrataan pembagian pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkhususnya di wilayah pesisir tersebut. Saran dari peneliti agar pemerintah daerah dapat memperhatikan lagi sistem jaminan kesehatan serta pelayanan kesehatan di wiliyah pesisir tersebut bdapat terbagi dengan rata pada msayarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki EW, Sulistyowati, Herawati NR. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Kesehatan Di Kota Semarang. Diponegoro J Soc Polit Sci Tahun [Internet]. 2016
- Rizal Wahyudin, Nawawi Natsir AS. Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Donggala Kabupaten Donggala. Katalogis. 2016
- Jamkesda S, Sumatra W. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Undang-gram Jaminan Kesehatan Daerah Sumatera Barat pembiayaan kesehatan sehingga pelayanan kes- Jamkesda Sumatera Barat Sakato melibatkan pihak ketiga sebagai Badan Penyelenggaran (Bapel) yaitu Sistem J. 2013
- Djiko R, Tangkau CHS. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara. Adm Publik. 2014
- Wijaya S. Analisis Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan Anggota Kepesertaan Bpjs (Studi Di Puskesmas Wiyung, Kota Surabaya Tahun 2017). JI-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan). 2018
- Kamal Alamsyah, Ellya Niken Prastiwi US. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi. Kebijak J Ilmu Adm. 2021
- Sukowati NP, Hadi M, Rengu SP. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda Dan Spm) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar) Nuryatin Phaksy Sukowati, Minto Hadi, Stefanus Pani Rengu. 2004
- Ridho F. Implementasi Kebijakan Bpjs Dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Probolinggo. 2016;
- Budiman Rusli. 2004, Pelayanan Publik di Era Reformasi. Jakarta
- Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Sosial. Format-format Kuantitatif Dan Kualitatif. Universitas Airlangga Press. Surabaya: Fanar Syukuri Agus, 2010. Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
- Imbalo S. Pohas. 2007. Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan. EGCMcmatian Rosemary,dkk, 1999. Manajemen Pelayanan Kesehatan Prima. Penerbit Buku Kedokteran EGC.Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar PelayananMinimal bidang Kesehatan Kab/Kota.